



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

**BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

 birohukum@jatengprov.go.id
 Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang
 024-8311282



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	5
KATA PENGANTAR	6
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Isu-isu Strategis	10
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	12
1.4 Sistematika Penulisan	15
1.5 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	17
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	23
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	34
3.2 Realisasi Anggaran	88
3.3 Inovasi	88
3.4 Penghargaan	89
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	93
4.2 Rekomendasi	96

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
- Laporan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum Non Litigasi Dan Aduan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
- Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Pemetaan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	11
Tabel 1.2 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan	12
Tabel 1.3 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang	13
Tabel 1.4 : Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 1.5 : Susunan Kegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Tabel 1.6 : Sarana Dan Prasarana	16
Tabel 1.7 : Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	17
Tabel 1.8 : Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi LKjIP Biro Hukum SETDA Tahun 2024	18
Tabel 2.1 : Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Hukum	20
Tabel 2.2 : Rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2025	21
Tabel 2.3 : Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Berdasarkan RENSTRA SETDA Tahun 2024-2026	22
Tabel 2.4 : Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	23
Tabel 2.5 : Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2025	24
Tabel 2.6 : Penganggaran Program dan Kegiatan Biro Hukum Tahun 2025	25
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2025	34
Tabel 3.2 : Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	37
Tabel 3.3 : Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya	38
Tabel 3.4 : Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Renstra Akhir Tahun 2026	39
Tabel 3.5 : Analisis Penyebab Keberhasilan	41
Tabel 3.6 : Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42

Tabel 3.7	: Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja	44
Tabel 3.8	: Daftar Harmonisasi Dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	46
Tabel 3.9	: Daftar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	48
Tabel 3.10	: Daftar Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025	53
Tabel 3.11	: Daftar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025	56
Tabel 3.12	: Inventarisasi Analisis, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Tahun 2025	78
Tabel 3.13	: Capaian Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Kabupaten/Kota	80
Tabel 3.14	: Daftar Rekapitulasi Penanganan Perkara Tahun 2025	81
Tabel 3.15	: Daftar Perkara Yang Melibatkan Pemerintah Daerah Tahun 2025	83
Tabel 3.16	: Capaian Anggaran Program Dan Kegiatan Tahun 2025	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Single Sign On (SSO) Aplikasi GRMS	27
Gambar 2.2 : Aplikasi e-Budgeting	28
Gambar 2.3 : Aplikasi e-Controlling	28
Gambar 2.4 : Aplikasi e-RKO	29
Gambar 2.5 : Aplikasi e-Planning	29
Gambar 2.6 : Website JDIH Biro Hukum	30
Gambar 2.7 : Website Perpustakaan JDIH Biro Hukum	30
Gambar 2.8 : Aplikasi Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD)	31
Gambar 2.9 : Aplikasi Waskito Jateng	31
Gambar 2.10 : Aplikasi RANHAM Provinsi Jawa Tengah	32
Gambar 2.11 : Aplikasi Ulas Pranata pada JDIH Jateng	33
Gambar 3.1 : Penerimaan Penghargaan Juara I Kategori Provinsi Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025	90
Gambar 3.2 : Piagam Penghargaan Juara I Kategori Provinsi Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025	90
Gambar 3.3 : Penerimaan Penghargaan Dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Terbaik II Tingkat Biro Tahun 2025	91
Gambar 3.4 : Piagam Penghargaan Dan Trophy Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Terbaik II Tingkat Biro Tahun 2025	92

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui penyusunan laporan ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta menjadi upaya pencegahan terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selain itu, laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang mencerminkan komitmen Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*.

Di samping itu, LKjIP ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, termasuk berbagai permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian yang telah dan akan dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2024–2026.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, laporan ini menyajikan informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi kinerja tersebut didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Strategis Tahun 2024–2026, serta Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Akhir kata, diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang, serta menjadi dasar dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara berkelanjutan.

Semarang, 25 Januari 2026



Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197007291996031001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and service* yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Disamping itu juga masyarakat menuntut adanya supremasi hukum, terjaminnya kepastian hukum, perlindungan hukum yang adil dan merata, penegakan keadilan yang obyektif dan manusiawi, produk hukum daerah yang melindungi kepentingan masyarakat, serta peningkatan kualitas penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan terhadap Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan serta koordinasi administratif.

Berdasarkan aturan tersebut, di lingkungan Sekretariat Daerah dibentuk berbagai Biro, salah satunya Biro Hukum, untuk menangani fungsi-fungsi di bidang pembentukan peraturan, bantuan hukum, dan dokumentasi peraturan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, efektif, dan berlandaskan prinsip negara hukum, diperlukan pengoordinasian yang optimal dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota serta pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di bidang hukum, Biro hukum memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta keselarasan kebijakan Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dimana tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan berdasarkan **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah** serta **Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur**, sebagai landasan penguatan kelembagaan dan pelaksanaan fungsi koordinatif di bidang hukum yang sejalan dengan dinamika regulasi dan meningkatnya kebutuhan terhadap kualitas produk hukum daerah, penyelesaian permasalahan di bidang hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah menjadi penting untuk memastikan terwujudnya regulasi yang harmonis, tidak bertentangan dengan

kepentingan umum, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan Daerah dan mendukung program visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

1.2 Isu-isu Strategis

Potensi permasalahan di bidang hukum pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain belum optimalnya pendayagunaan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia, serta belum sepenuhnya efektifnya koordinasi antar perangkat daerah. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tingkat kepatuhan aparaturnya dan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta dinamika perkembangan kondisi dan situasi yang terus berubah dan berdampak pada relevansi serta keberlakuan produk hukum daerah. Selain faktor-faktor tersebut, terdapat pula potensi permasalahan yang timbul akibat kondisi atau peristiwa yang belum dapat diantisipasi sebelumnya.

Dalam rangka merespons isu strategis tersebut, diperlukan upaya identifikasi yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, termasuk penetapan faktor-faktor penentu keberhasilan penyelesaiannya di masa mendatang. Faktor penentu keberhasilan dimaksud mencakup faktor kritis, capaian kinerja, serta faktor lain yang memiliki daya ungkit tinggi dalam memperkuat penyelesaian permasalahan di bidang hukum dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah terutama di bidang hukum telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan bidang hukum yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan utama (*strategic issued*) dalam pembangunan di bidang hukum yang sedang dihadapi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Pemetaan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

NO	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Perencanaan penyusunan produk hukum belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang undangan.	Kajian penyusunan produk hukum belum dilakukan secara optimal dan melibatkan pemangku kepentingan terkait.	Produk Hukum Daerah tidak terimplementasi secara efektif.
2.	Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.	Ketidaksesuaian Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.	Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tidak terimplementasi secara efektif.

NO	MASALAH UTAMA	MASALAH	AKAR MASALAH
3.	Tidak tertanganinya permasalahan hukum di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan hukum di Jawa Tengah.	Ketidakpastian hukum terhadap permasalahan hukum yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Pada tahun 2025, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran sebagai berikut :

1. Susunan Pegawai

Susunan Kepegawaian Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah yaitu:

a. Berdasarkan jabatan :

Tabel 1.2.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	JFU	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	-	-	-	12	2	14
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	-	-	1	12	5	18
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/kota	-	-	-	12	2	14
Jumlah Total	1	-	1	36	9	47

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :

Tabel 1.3.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	PPPK Gol. IX	PPPK Gol. VII	PPPK Gol. V	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	-	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	1	10	1	2	-	-	14
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	2	13	-	1	1	1	18
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/kota	3	9	-	1	0	1	14
Jumlah Total	7	32	1	4	1	2	40

c. Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.4.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Unit Kerja	Pasca Sarjana	Sarjana S1/ D4	Sarjana Muda/D3	SLTA	Jumlah
Kepala Biro	1	-	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	2	11	1	-	14
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	6	9	2	1	18
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/kota	2	11	-	1	14
Jumlah Total	11	31	3	2	47

d. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 1.5.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kepala Biro	1	-	1
Bagian Perundang-undangan	9	5	14
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	13	5	18
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ kota	7	7	14
Jumlah Total	30	17	47

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Biro Hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terdiri dari :

Tabel. 1.6.
Sarana dan Prasana

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda 4	6 Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	3 Unit	Baik
3.	Komputer	43 Unit	Baik
4.	Laptop	7 Unit	Baik
5.	Printer	41 Unit	Baik
6.	LCD/In Focus	4 Unit	Baik
7.	Pesawat Televisi	5 Unit	Baik
8.	Mesin Ketik Manual	2 Unit	Baik
9.	Ruang Rapat	3 Ruang	Baik
10.	<i>Airphone</i>	11 Unit	Baik
11.	<i>Pesawat Telephone</i>	2 Unit	Baik
12.	<i>Faximile</i>	2 Unit	Baik
13.	Kursi Tamu	6 Stel	Baik

3. Anggaran

Untuk mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2025, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum, dan Program

Administrasi Umum dengan total anggaran sebesar Rp.3.235.169.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

1.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan memuat latar belakang dibentuknya organisasi, mandat kinerja, peta proses bisnis dan struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, dukungan SDM, sarana prasarana dan Anggaran. Selanjutnya disampaikan sistematika penulisan, tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 serta langkah perbaikan internal OPD.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait tujuan, sasaran dan indikator kinerja OPD yang memuat rencana strategis yang terdiri dari visi, misi dan tujuan & sasaran. Selanjutnya diuraikan terkait strategi dan arah kebijakan yang menjabarkan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra. Menyampaikan struktur program dan kegiatan tahun 2025, Perjanja Kinerja tahun 2025, Instrumen Pendukung Capaian Kinerja dengan menyajikan instrumen-instrumen pendukung penerapan SAKIP seperti GRMS, aplikasi yang dikembangkan oleh OPD, serta aplikasi dari kementerian yang digunakan jika ada.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya (2023 dan 2024). Selanjutnya membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional jika ada.
2. Menguraikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Menyampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Disampaikan efisiensi anggaran apabila ada sisa anggaran. Menyampaikan efektifitas bila capaian kinerja mencapai 100% atau lebih dan anggaran hanya terserap 96% ke bawah.
4. Menyampaikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
5. Menyajikan inovasi-inovasi yang dilakukan dan dimiliki oleh OPD dalam mendukung kinerja di tahun 2025.
6. Menyajikan penghargaan-penghargaan yang diperoleh baik regional maupun nasional di tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rekomendasi yang menampilkan langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh organisasi kedepannya untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu.

1.5 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa pada Tahun 2024 terdapat rekomendasi terhadap evaluasi SAKIP yang diberikan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya termasuk Biro Hukum dan telah ditindaklanjuti sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.7.
Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Optimalisasi evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan keselarasan capaian kinerja pada dokumen perjanjian kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI), dengan aplikasi e-controlling kinerja.	Melakukan Desk Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) agar selaras dengan capaian kinerja pada aplikasi e-Controlling Kinerja.
2.	Biro-Biro meningkatkan pelaksanaan agenda-agenda yang mampu mendukung target kinerja Program dan Kegiatan yang dapat mengungkit kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah.	a. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dengan peserta OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. b. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH.

1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD

Tindak lanjut terhadap rekomendasi/saran pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8.
Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi LKjIP
Biro Hukum SETDA Tahun 2024

No.	Rekomendasi/Saran	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Perlu untuk mengikutisertakan 11 orang Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan pengembangan karier disamping sebagai upaya untuk mendukung kinerja, tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dengan disertai penambahan alokasi anggaran yang memadai.	Penugasan 5 orang Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum pada Kementerian Hukum RI.	a. Diklat yang diselenggarakan pada tanggal 3 Februari s.d. 6 Mei 2025 diikuti atas nama Aji Setiawan, SH. b. Diklat yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juni s.d. tanggal 29 Agustus 2025 diikuti oleh : 1) Ali Khaidar, SH. 2) Bayu Agusta Ardiansyah, SH. 3) Haryono Adi Wibowo, SH. 4) Friendly Hadi Irmansyah, SH.
2.	Perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum terkait perolehan kuota peserta diklat perancang peraturan perundang-undangan.	Melakukan rapat internal pada tanggal 24 Januari 2025 dalam rangka Pembahasan Usulan Peserta Diklat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Tahun 2025, yang ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum terkait kebutuhan diklat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.	Menerima Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum tanggal 4 Juni 2025 nomor SDM.3-SM.03-03-278 hal Pemanggilan Peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Tahun 2025.
3.	Pemberian bantuan hukum secara gratis kepada kelompok rentan di Jawa Tengah yang sedang menghadapi permasalahan hukum belum sepenuhnya terakomodir.	Melakukan pemberian bantuan hukum melalui kerjasama dengan LBH di Jawa Tengah secara gratis kepada kelompok rentan.	Kelompok rentan yang mendapat bantuan hukum secara gratis dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

a. Tujuan

Biro Hukum dalam melakukan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan tujuan yang ada pada Sekretaris Daerah berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 guna memecahkan permasalahan serta menangani isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2025, yaitu:

- 1) Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah; dan
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.

b. Sasaran

Biro Hukum pada tahun 2025 melakukan intervensi pelaksanaan sasaran yang ada pada Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026, yaitu:

- 1) Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
- 3) Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah.

c. Indikator Kinerja OPD

Biro Hukum dalam mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selanjutnya merumuskan sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah dengan indikator strategis persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.

- b. Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah Kabupaten /Kota, dengan indikator strategis persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji.
- c. Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas bantuan hukum, dengan indikator strategis persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.
- d. Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas Kabupaten/Kota peduli HAM, dengan indikator strategis persentase kabupaten/kota peduli HAM.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum, dengan indikator strategis persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum.

Selanjutnya Tujuan, Sasaran, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Biro Hukum pada rentang waktu Tahun 2024 sampai dengan 2026 berdasarkan target volume dalam RENSTRA SETDA 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Biro Hukum

NO	TUJUAN	SASARAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		
					2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	96	97	97
			Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah Kabupaten /Kota	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	96	96	96
			Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas bantuan hukum	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	96	96	96

NO	TUJUAN	SASARAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		
					2024	2025	2026
			Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas Kabupaten/Kota peduli HAM	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	96	96	96
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	100	100	100
				Nilai IKM Biro Hukum	82	82,5	83
		Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah		Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum	2,83	2,85	2,87

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Biro Hukum dalam rangka pemenuhan LHP SPIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, tahun 2025 melakukan revisi terhadap target capaian program pada rencana kerja sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	Persen	100
2.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah Kabupaten /Kota	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	Persen	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas bantuan hukum	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	Persen	100
4.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas Kabupaten/Kota peduli HAM	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	Persen	100
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	Persen	100
		Nilai IKM Biro Hukum	Angka	82,5
3.	Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum	Angka	3

Tabel 2.3.
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Berdasarkan RENSTRA SETDA Tahun 2024-2026

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas kebijakan daerah yang berorientasi hasil dan adaptif
			Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah
		Meningkatkan koordinasi, sinergi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	Peningkatan Efektivitas Pembangunan Daerah melalui Pengembangan Jejaring Manajemen dan SDM yang Profesional
			Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian, dan keuangan	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah
3.	Meningkatnya manajemen risiko Sekretariat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Peningkatan efektifitas manajemen resiko melalui Sinkronisasi Agenda Biro-Biro Lingkup Sekretariat Daerah

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Arah kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan melalui program dan kegiatan, berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan selanjutnya diturunkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 program sebagai berikut:

1. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Dari 2 program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan. 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan. 3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya. 4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota.
	2. Fasilitasi Bantuan Hukum	1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum. 2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 2. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen penugasan dari atasan kepada bawahan dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang memuat target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun anggaran, beserta indikator dan ukurannya.

Dalam konteks pemerintah daerah (misalnya di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah), Perjanjian Kinerja merupakan turunan dari:

- RPJMD
- Renstra Perangkat Daerah
- Renja Perangkat Daerah
- Dokumen Anggaran (DPA)

Secara manajerial dan administratif, Perjanjian Kinerja berfungsi untuk:

1. Menetapkan komitmen kinerja antara pimpinan dan bawahan.
2. Menjadi dasar pengukuran dan evaluasi kinerja tahunan.
3. Menjadi dasar penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).
4. Mendukung implementasi SAKIP berbasis outcome.

Untuk itu dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Hukum pada Tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	Persen	100
2.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah Kabupaten /Kota	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	Persen	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas bantuan hukum	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	Persen	100
4.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas Kabupaten/Kota peduli HAM	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	Persen	100
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum.	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	Persen	100
	5.1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum	Angka	82,5
	5.2. Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah.	Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum	Angka	3

Selanjutnya dari sasaran strategis dan indikator kinerja diturunkan ke dalam program dan kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.6.
Penganggaran Program dan Kegiatan Biro Hukum Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
1.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100%	3.235.169.000
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	100%	
		Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	100%	
		Persentase kabupaten/kota peduli HAM	100%	
	a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah	12 dokumen	362.241.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
		dan Peraturan Gubernur		
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	12 dokumen	51.844.000
		Jumlah dokumen kajian produk hukum	12 dokumen	374.261.000
		Jumlah Dokumen Fasilitas dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	542.165.000
	b. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara.	12 dokumen	1.250.599.000
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	12 dokumen	229.541.000
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum.	100 %	876.209.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum	82,5	
		Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum	3	
	a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar	100 %	326.480.000

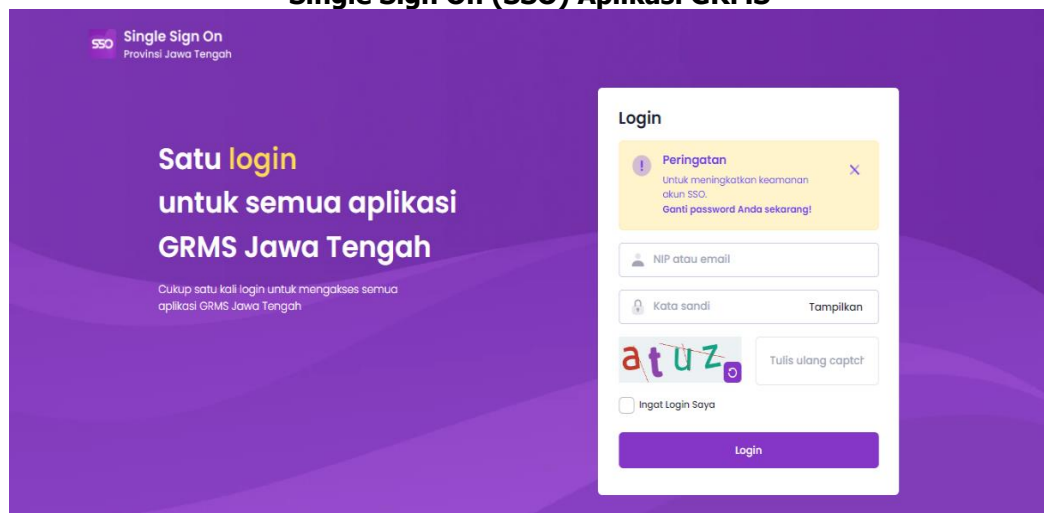
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp.)
		layanan Biro Hukum		
	b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	100 %	98.038.000

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Biro Hukum dalam melaksanakan capaian kinerja dan penerapan SAKIP di dukung dengan instrumen-instrumen, antara lain :

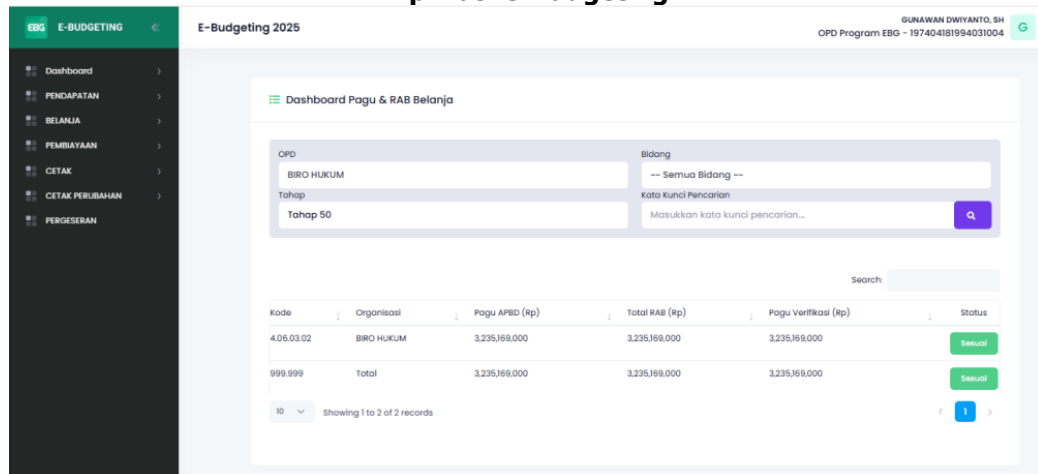
- a. Aplikasi SSO GMRS (Government Resource Management System) merupakan sistem aplikasi pemerintahan digital yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengelola perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan sumber daya pemerintah secara terintegrasi. Tujuan utamanya adalah mempermudah proses perencanaan dan pengelolaan anggaran serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Gambar 2.1.
Single Sign On (SSO) Aplikasi GRMS



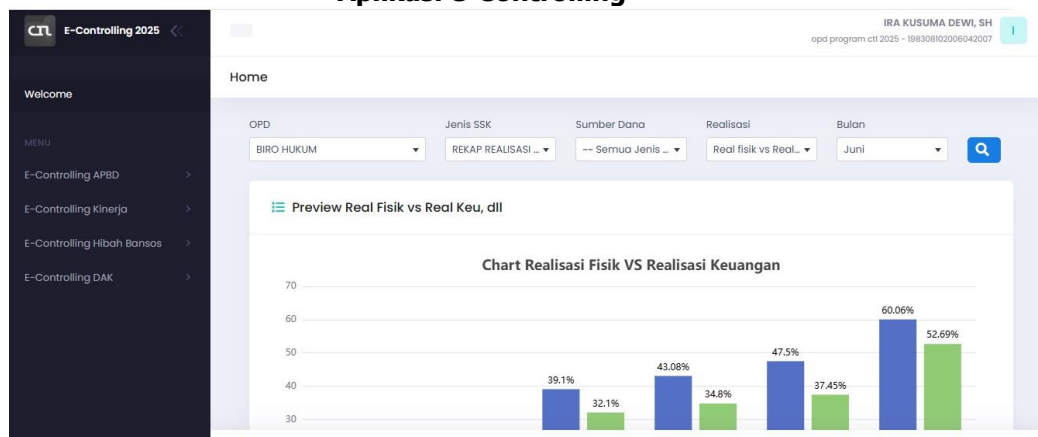
- b. Aplikasi e-Budgeting merupakan sistem pengelolaan anggaran daerah berbasis elektronik untuk mendukung seluruh tahapan penganggaran APBD.

Gambar 2.2.
Aplikasi e-Budgeting



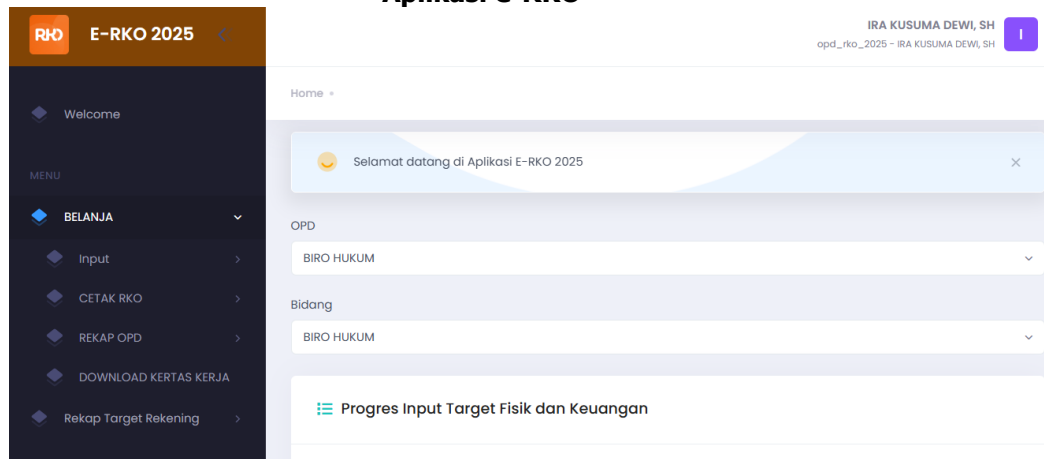
- c. Aplikasi e-Controlling adalah aplikasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran.

Gambar 2.3.
Aplikasi e-Controlling



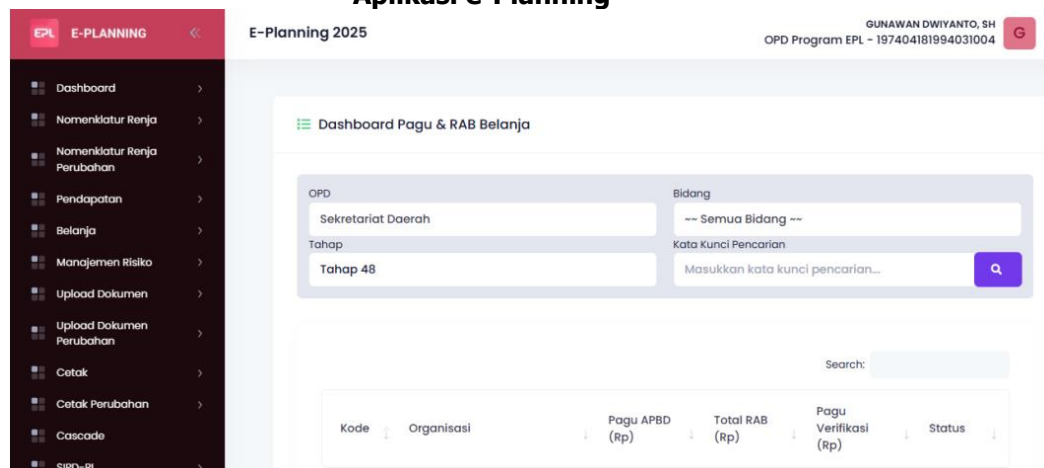
- d. Aplikasi e-RKO adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun, merencanakan, dan mengendalikan rencana kegiatan beserta target output di Biro Hukum secara terstruktur dan terukur.

Gambar 2.4.
Aplikasi e-RKO



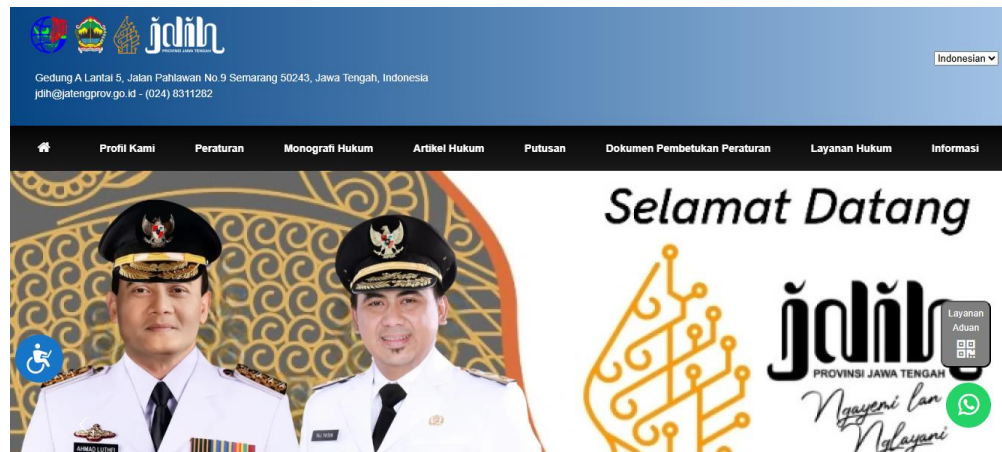
- e. Aplikasi e-Planning merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan secara elektronik, terintegrasi, dan berbasis kinerja.

Gambar 2.5.
Aplikasi e-Planning



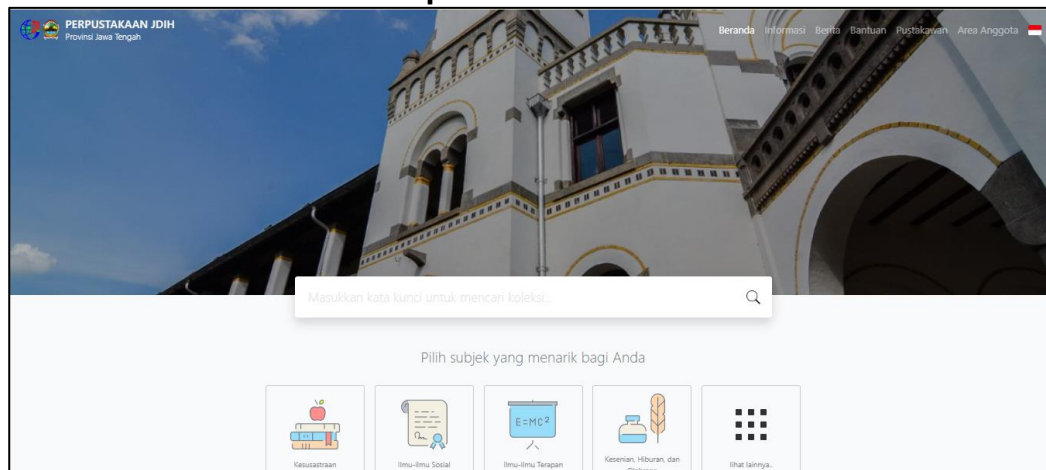
- f. Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum adalah Portal utama JDIH yang menyediakan akses terhadap produk hukum, peraturan, dan dokumen hukum lain yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah. Website JDIH merupakan kanal resmi yang dikelola oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota dari JDIH Nasional.

Gambar 2.6.
Website JDIH Biro Hukum



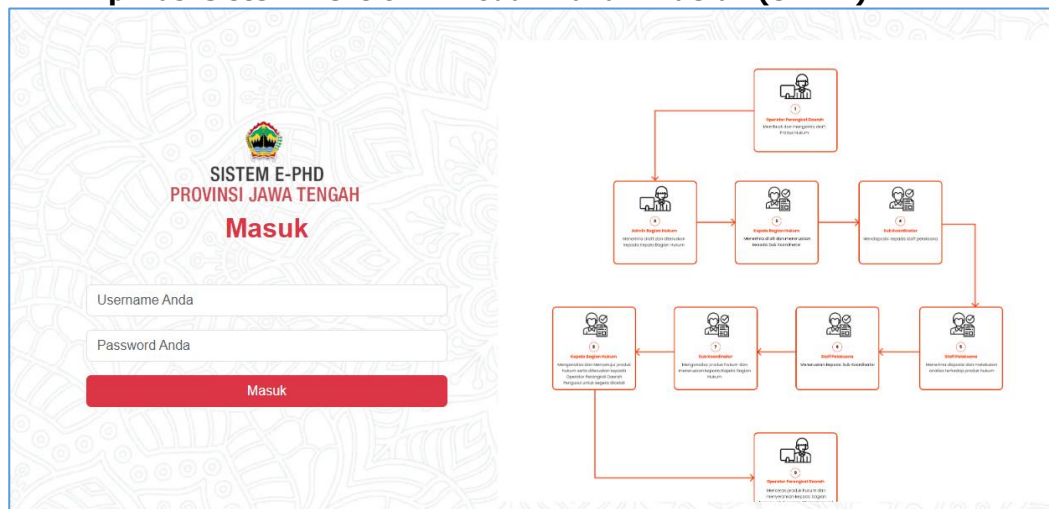
- g. Website Perpustakaan JDIH Provinsi Jawa Tengah merupakan layanan informasi kepustakaan hukum serta panduan layanan perpustakaan. Terdapat halaman pencarian koleksi perpustakaan JDIH Jawa Tengah yang memungkinkan pencarian berdasarkan judul, pengarang, subjek, dsb.

Gambar 2.7.
Website Perpustakaan JDIH Biro Hukum



- h. Aplikasi Sistem Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD) merupakan sistem elektronik yang memfasilitasi proses penyusunan, pengajuan, harmonisasi, dan sinkronisasi produk hukum daerah (seperti Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur) secara *online* tanpa perlu proses manual/kertas.

Gambar 2.8.
Aplikasi Sistem Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD)

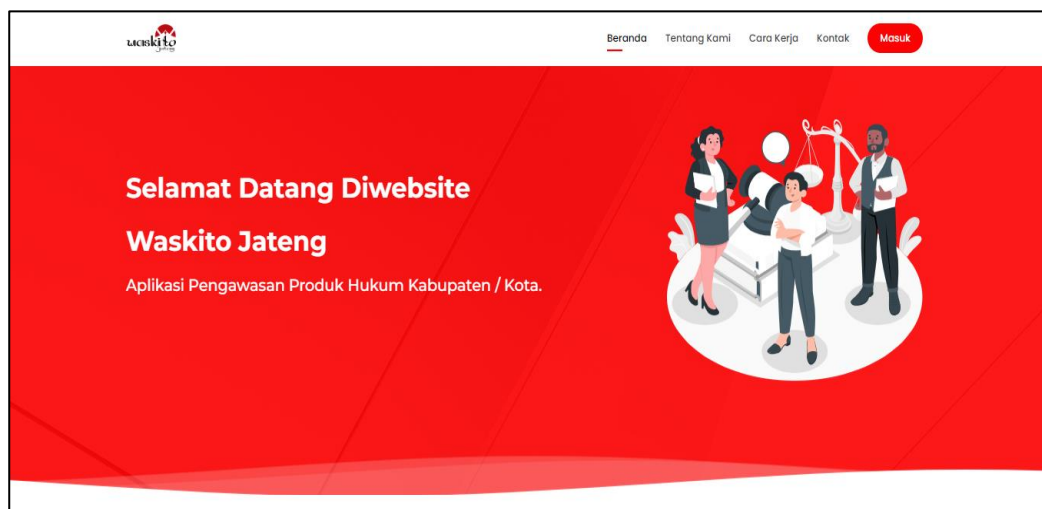


- i. Aplikasi eWaskito Jateng adalah sistem/aplikasi elektronik yang dirancang untuk mendukung pemerintahan daerah dalam proses pengawasan dan pengelolaan produk hukum di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Aplikasi ini dipakai untuk:

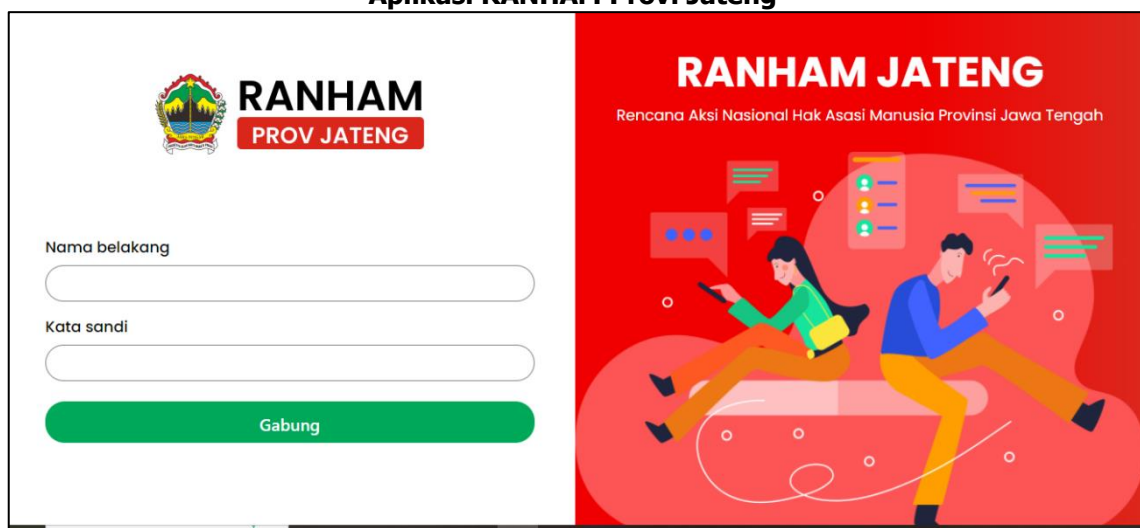
- Memfasilitasi pengawasan terhadap produk hukum daerah yang telah atau sedang disusun.
- Membantu evaluasi, klarifikasi, dan proses nomor register produk hukum yang berlaku.
- Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas peraturan daerah melalui mekanisme digital yang terstruktur.

Gambar 2.9.
Aplikasi Waskito Jateng



- j. Aplikasi RANHAM Jateng adalah sistem digital yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung pelaksanaan dan pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Aplikasi ini dipakai untuk manajemen dan pelaporan pelaksanaan aksi HAM di Jawa Tengah, termasuk memasukkan data capaian, indikator, dan realisasi kegiatan RANHAM.

Gambar 2.10
Aplikasi RANHAM Prov. Jateng



- k. Ulas Pranata (Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum).

Ulas Pranata merupakan sistem/portal elektronik yang menampilkan hasil analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah (seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur) yang telah diberlakukan di Provinsi Jawa Tengah. Tujuannya adalah menilai kualitas suatu peraturan perundang-undangan dari segi normatif dan efektivitas implementasi, serta memfasilitasi masukan dari pemangku kepentingan atau masyarakat terhadap produk hukum tersebut.

Fungsi Utama Ulas Pranata:

- 1) Menyajikan dokumen hasil analisis dan evaluasi hukum atas produk hukum daerah yang sudah berlaku.

- 2) Memberi akses bagi pihak terkait untuk membaca hasil evaluasi (misalnya latar belakang, temuan, dan rekomendasi tindak lanjut evaluasi).
- 3) Menjadi media kontribusi stakeholder atau masyarakat untuk memberikan penilaian secara terbuka terhadap produk hukum yang dievaluasi melalui fitur ulasan/penilaian.

Gambar 2.11
Portal Ulas Pranata pada JDIH Jateng

Ulas Pranata - Analisis dan Evaluasi Hukum

Analisis dan evaluasi hukum dilakukan dengan tujuan untuk menilai kualitas suatu peraturan perundang-undangan yang telah berlaku baik pada segi normatif sekaligus efektifitas implementasi



Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Konfir...

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51A Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pergub ...



Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Ap...

Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan (SIAP Jateng) berpotensi mengalami disharmoni dengan perkembangan regulasi antara lain Pergu ...



Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Per...

Peraturan Gubernur Jawa Tengah (Pergub) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berpotensi mengalami disharmoni dengan perkembangan reg ...

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

- a. Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- b. Tinggi : 76 – 90,99%
- c. Sedang : 66 – 75,99%
- d. Rendah : 51 - 65,99%
- e. Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$

Rencana Kerja Tahun 2025, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan “Meningkatkan Efektivitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan “Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah” dengan sasaran strategis “Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah” dan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Daerah”. Selanjutnya dalam menjabarkan pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka Biro Hukum melaksanakannya melalui sasaran strategis Biro Hukum tahun 2025 yang capaiannya dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Tar get	Realisasi	Persen tase	
1	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	Persen	100	100	100	97

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD
				Tar get	Realisasi	Persen tase	
2	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah Kabupaten /Kota	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji.	Persen	100	103	103	96
3	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas bantuan hukum	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	Persen	100	102	102	96
4	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas Kabupaten/Kota peduli HAM	Persentase kabupaten / kota peduli HAM	Persen	100	100	100	96
5	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum.	Persen	100	100	100	100
		Nilai IKM Biro Hukum	Angka	82,5	89,25	108	83
		Nilai Indeks Manajemen Risiko	Angka	3	2,71	90,4	3

Biro Hukum melalui **Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** dan **Program Administrasi Umum** dengan alokasi anggaran Rp.3.235.169.000,- tercapai realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.174.713.420,- (98,13%). Program ini terdistribusi kedalam 2 Sasaran Program dan 7 Indikator Kinerja Program yang semuanya dengan tingkat capaian "**Sangat Tinggi**" yaitu persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan dengan realisasi 100% sesuai target, persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji dengan realisasi 103% melebihi target, persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani dengan realisasi 102% melebihi target, persentase kabupaten/kota peduli HAM dengan realisasi 100% sesuai target, dan

Persentase capaian administrasi umum dan keuangan Biro Hukum tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pencapaian yang rata-rata sesuai target karena pelaksanaan koordinasi, konsultasi serta fasilitasi antara Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan apa yang diharapkan. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur telah sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan Program Pembentukan Peraturan Gubernur (Propempergub). Analisis, evaluasi dan pengkajian terhadap produk-produk hukum telah dilakukan sesuai dengan target capaian. Demikian pula pendokumentasian produk-produk hukum baik secara manual maupun digitalisasi yang diupload ke dalam website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah juga telah sesuai dengan apa yang ditargetkan. Disamping itu pula penggunaan aplikasi layanan E-PHD Provinsi Jawa Tengah, Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah, eWaskito Jateng semakin mempermudah dalam pelaksanaan pengkajian, evaluasi, fasilitasi, penyusunan rancangan produk hukum daerah serta pendokumentasian dan penginformasian produk hukum lebih efektif dan efisien.

Sedangkan persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani yang melebihi target dikarenakan terdapat tambahan perkara yang masuk dan tetap dapat ditangani secara optimal sehingga realisasi melampaui target. Selain itu adanya peningkatan efektivitas koordinasi dan respons cepat melalui koordinasi yang lebih intensif dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga koordinasi tersebut mempercepat proses klarifikasi, mediasi, penyusunan jawaban hukum, hingga penyampaian dokumen litigasi.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Perbandingan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan mampu memenuhi indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Terhadap hasil kinerja tersebut dapat dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Biro Hukum
2.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah Kabupaten /Kota	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dikaji.	100%	100%	103%	Sangat Tinggi	Biro Hukum
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas bantuan hukum	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	100%	100%	102%	Sangat Tinggi	Biro Hukum
4.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas Kabupaten/Kota peduli HAM	Persentase kabupaten / kota peduli HAM	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Biro Hukum
5.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Biro Hukum
		Nilai IKM Biro Hukum	82,5	89,25	108	Sangat Tinggi	Biro Organisasi
		Nilai Indeks Manajemen Risiko	3	2,71	90	Tinggi	Inspektorat

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja program pada Biro Hukum capaian realisasinya dikategorikan **"Sangat Tinggi"**. Hal tersebut dikarenakan seluruh realisasi melampaui target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.3.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	100 %	100 %	100 %	96%	100 %	104 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah Kabupaten /Kota	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dikaji	100 %	100 %	100 %	96%	100 %	104 %	100 %	103 %	103 %
3	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas bantuan hukum	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	100 %	100 %	100 %	96%	100 %	104 %	100 %	102 %	102 %
4	Meningkatkan kualitas kebijakan dan	Persentase kabupaten/ kota peduli HAM	96 %	100 %	104 %	96%	100 %	104 %	100 %	100 %	100 %

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
	efektifitas Kabupaten /Kota peduli HAM										
5.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Nilai IKM Biro Hukum	78,5	83,5	106	82	86	105	82	89,25	108
		Nilai Indeks Manajemen Risiko							3	2,71	90

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya rata-rata selalu melebihi target.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2026 yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dengan Target Renstra Akhir Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100%	97%	103%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
2.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dikaji.	100%	96%	104%
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas bantuan hukum	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	100%	96%	104%
4.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas Kabupaten/Kota peduli HAM	Persentase kabupaten / kota peduli HAM	100%	96%	104%
5.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100%	100%	100%
		Nilai IKM Biro Hukum	89,25	83	107,5%
		Nilai Indeks Manajemen Risiko	2,71	3	90%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, realisasi kinerja Biro Hukum Tahun 2025 terhadap Target Akhir RPD rata-rata telah melampaui target. Hal ini dikarenakan, capaian masing-masing indikator kinerja telah tercapai 100%.

- Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Sedangkan analisis terhadap penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.5.
Analisis Penyebab Keberhasilan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100%	100%	100%	Rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan telah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dan disusun tepat waktu.	-
2.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah Kabupaten / Kota	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji.	100%	103%	103%	Rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi dan difasilitasi berhasil diselesaikan tepat waktu.	-
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas bantuan hukum	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	100%	104%	104%	Fasilitasi Bantuan hukum dan sengketa hukum telah tertangani secara optimal.	-
4.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas Kabupaten/Kota peduli HAM	Persentase kabupaten / kota peduli HAM	100%	100%	100%	Pelaporan data kabupaten/kota peduli HAM telah selesai dilakukan terhadap 35 kabupaten/kota	-
5.	Meningkatkan kualitas administrasi umum Biro Hukum.	Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100%	100%	100%	Administrasi umum dan keuangan Biro Hukum telah dilakukan selesai tepat waktu.	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
		Nilai IKM Biro Hukum	82,5	89,25	108	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang ada di Biro Hukum.	-
		Nilai Indeks Manajemen Risiko	3	2,71	90	-	Melakukan penguatan tata kelola risiko melalui peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan dokumen risiko, integrasi dengan sistem kinerja, serta monitoring berkala.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kinerja masing-masing indikator pada Biro Hukum Tahun 2025 didukung oleh terlaksananya kegiatan pada tiap-tiap indikator kinerja antara lain Rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan telah sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dan disusun tepat waktu, Rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dievaluasi dan difasilitasi berhasil diselesaikan tepat waktu, Bantuan hukum dan sengketa hukum telah tertangani selesai sesuai dengan jumlah target perkara yang masuk, Pelaporan data kabupaten/kota peduli HAM telah selesai dilakukan terhadap 35 kabupaten/kota, Administrasi umum dan keuangan Biro Hukum telah dilakukan selesai tepat waktu, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang ada di Biro Hukum. Sedangkan terhadap capaian Nilai Indeks Manajemen Risiko di Biro Hukum hanya tercapai 90%, maka langkah yang adalah melakukan

penguatan tata kelola risiko melalui peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan dokumen risiko, integrasi dengan sistem kinerja, serta monitoring berkala.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Indikator Program	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100 %	100 %	100 %	788.346.000	767.606.490	97,37	2,63
2.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dikaji.	100 %	103 %	103 %	542.165.000	541.597.130	99,90	0,10
3.	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	100 %	102 %	102 %	1.250.599.000	1.249.017.500	99,87	0,13
4.	Persentase kabupaten / kota peduli HAM	100 %	100 %	100 %	229.541.000	204.908.600	89,27	10,73

No	Indikator Program	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
5.	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum.	100 %	100 %	100 %	424.518.000	411.583.700	96,95	3,05
	Nilai IKM Biro Huku	82,5	89,25	108 %				
	Nilai Indeks Manajemen Risiko	3	2,71	90%				

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa dari anggaran Biro Hukum sebesar Rp. 3.235.169.000,- atas pencapaian 5 (lima) indikator program pada tahun 2025 sebesar Rp. 3.174.713.420,- (98,13%) capaian realisasi anggaran dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,87%.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disampaikan melalui tabel berikut :

Tabel 3.7.
Analisis Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program	Indikator Kinerja Program	% Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 dokumen	Menunjang
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	12 dokumen	Menunjang

No	Program	Indikator Kinerja Program	% Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian produk hukum	12 dokumen	Menunjang
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/ kota yang dikaji.	103	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/ Kota	12 dokumen	Menunjang
		Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	102	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	12 dokumen	Menunjang
		Persentase kabupaten / kota peduli HAM	100	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	12 dokumen	Menunjang
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	100%	Menunjang
			89,25		Nilai IKM Biro Hukum	89,25	Menunjang
			2,71		Nilai Indeks Manajemen Risiko	2,71	Menunjang
			100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	100%	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum memiliki 4 (empat) indikator kinerja program, dengan didukung oleh 2 (dua) kegiatan antara lain:

a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan.

Kegiatan ini merupakan penunjang Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada indikator kinerja persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Bahwa Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan pada tahun 2025 telah berhasil menyusun 12 dokumen penyusunan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang didukung pula melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, 12 dokumen penyusunan dan harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan dan 12 dokumen pengkajian melalui Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya.

Pada Tahun 2025 telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi sejumlah 19 (sembilan belas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8.
Daftar Harmonisasi dan Sinkronisasi
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Judul Raperda	Inisiasi	OPD pengusul/terkait
I	Triwulan I		
1.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	DPRD	Dinas Koperasi dan UKM
2.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	Kumulatif terbuka	BPKAD

No	Judul Raperda	Inisiasi	OPD pengusul/terkait
3.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah	Gubernur	Biro Perekonomian
4.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga	Gubernur	Biro Perekonomian
5.	Penyelenggaraan Sistem Pertanian	DPRD	Dinas pertanian dan perkebunan, Biro ISDA
II	Triwulan II		
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	DPRD	BPKAD
2.	Penyelenggaraan Perhubungan	DPRD	Dinas Perhubungan
3.	Penyelenggaraan Keolahragaan Di Provinsi Jawa Tengah	DPRD	Dinporapar
4.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	GUBERNUR	BAPEDA
5.	Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah	DPRD	Biro Perekonomian
6.	Penyelenggaraan Kearsipan	DPRD	Dinas Arpus
7.	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Gubernur	Biro Organisasi
III	Triwulan III		
1.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Kumulatif terbuka	BPKAD
2.	Penyelenggaraan Kepariwisata	DPRD	Dinporapar
3.	Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	DPRD	Bapeda, Biro Bangda
4.	Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat.	DPRD	Satpol PP
IV	Triwulan IV		
1.	Konsolidasi PT. BPR BKK Se Jawa Tengah Menjadi bank Syari'ah	DPRD	Biro Perekonomian
2.	Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Tengah	DPRD	Dinas Pusdataru
3.	APBD Tahun Anggaran 2026	Kumulatif terbuka	BPKAD

Tahun 2025 juga telah ditetapkan 16 (enam belas) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.9.
Daftar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Nomor Peraturan Daerah/ Tanggal Penetapan/ Tanggal Pengundangan	Tentang	Sumber	Status	Keterangan
1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 6 Maret 2025/ 6 Maret 2025	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha kecil	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 165	Berlaku	Mencabut : a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi ; dan b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
2	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2025 24 Maret 2025/ 24 Maret 2025	Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 166	Berlaku	Mencabut : a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

No	Nomor Peraturan Daerah/ Tanggal Penetapan/ Tanggal Pengundangan	Tentang	Sumber	Status	Keterangan
					Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara Dan Pihak Ketiga
3	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 28 Mei 2025/ 28 Mei 2025	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167	Berlaku	mencabut : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
4	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 28 Mei 2025/ 28 Mei 2025	Penyelenggaraan Perhubungan	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 168	Berlaku	Mencabut: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah
5	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 18 Juli 2025/ 18 Juli 2025	Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah	Berlaku	Mencabut: a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

No	Nomor Peraturan Daerah/ Tanggal Penetapan/ Tanggal Pengundangan	Tentang	Sumber	Status	Keterangan
			Provinsi Jawa Tengah Nomor 169		Jawa Tengah; b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
6	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 8 Agustus 2025/ 8 Agustus 2025	Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 6	Berlaku	
7	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 25 Agustus 2025/ 25 Agustus 2025	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170	Berlaku	Mencabut: Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun	Perubahan Anggaran Pendapatan dan	Lembaran Daerah Provinsi Jawa	Berlaku	

No	Nomor Peraturan Daerah/ Tanggal Penetapan/ Tanggal Pengundangan	Tentang	Sumber	Status	Keterangan
	2025 12 September 2025/ 12 September 2025	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Tengah Tahun 2025 Nomor 8		
9	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2025 13 Oktober 2025/ 13 Oktober 2025	Penyelenggaraan Keolahragaan	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 171	Berlaku	Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah
10	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 13 Oktober 2025/ 13 Oktober 2025	Penyelenggaraan Kearsipan	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 172	Berlaku	Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Provinsi Jawa Tengah
11	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 30 Desember 2025/ 30 Desember 2025	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 173	Berlaku	
12	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025	Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah	Berlaku	Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019

No	Nomor Peraturan Daerah/ Tanggal Penetapan/ Tanggal Pengundangan	Tentang	Sumber	Status	Keterangan
	31 Desember 2025/ 31 Desember 2025	Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 174		tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
13	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 31 Desember 2025/ 31 Desember 2025	Penanggulang-an Kemiskinan	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 175	Berlaku	
14	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 31 Desember 2025/ 31 Desember 2025	Pengelolaan Sumber Daya Air	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 176	Berlaku	Mencabut: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah
15	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 31 Desember 2025/ 31 Desember 2025	Penyelenggaraan Kepariwisata	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 177	Berlaku	Mencabut : 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pramuwisata di Provinsi Jawa Tengah 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019

No	Nomor Peraturan Daerah/ Tanggal Penetapan/ Tanggal Pengundangan	Tentang	Sumber	Status	Keterangan
					tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah
16	Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2025 31 Desember 2025/ 31 Desember 2025	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 178	Berlaku	Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan

Tahun 2025 Biro Hukum telah melaksanakan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan terhadap 45 (empat puluh lima) Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10.
Daftar Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	OPD PENGUSUL
I.	TRIWULAN I	
1.	Pelaksanaan APBD Tahun 2025	
2.	Indikator Kinerja	
3.	Roadmap Sanitasi	
4.	Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian Daerah
5.	Perubahan Ke Empat Pergub Nomor 120 Tahun 2016	
6.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Provinsi Jawa Tengah.	DPMPTSP
7.	Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah Di Jawa Tengah	DINAS ESDM

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	OPD PENGUSUL
8.	Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas A.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah
9.	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah
10.	Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah
11.	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2024	
II.	TRIWULAN II	
1.	Peraturan Pelaksana Perda nomor 1 tahun 2023	
2.	Peraturan Pelaksana Perda nomor 10 tahun 2023	
3.	Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim	
4.	Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji 13	BPKAD
5.	Kebijakan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
6.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Nomor 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7.	Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2029.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
8.	Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2019	
9.	Standarisasi Harga Provinsi Jawa Tengah	Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa
10.	Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.	Biro Hukum
III.	TRIWULAN III	
1.	Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.	Badan Kepegawaian Daerah

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	OPD PENGUSUL
2.	Penjabaran Peranggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024	BPKAD
3.	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2024 Dan Sebelum Tahun 2024.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
4.	Akselerasi Revitalisasi Industri Hijau Di Jawa Tengah.	
5.	Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
6.	Managemen Risiko Pembangunan Daerah	Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
7.	Kesejahteraan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan.	Dinas Kesehatan
8.	Pendayagunaan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan.	Dinas Kesehatan
9.	Rencana Induk Geopark Dieng	
10.	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	
11.	Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Cabang Dinas	Biro Organisasi
12.	Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah	Biro Organisasi
13.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan	Biro Organisasi
14.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur	Biro Organisasi
IV. TRIWULAN IV		
1.	Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja/Buruh	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.	Pakaian Dinas ASN	Biro Organisasi
3.	Rencana Aksi daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.	Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian Daerah
5.	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	OPD PENGUSUL
6.	Pemberian Bantuan Keuangan yang berasal dari APBD	Biro Administrasi dan Pembangunan Daerah
7.	Rencana Induk Pengembangan Ilmu Pengetahuan	Badan riset dan Inovasi Daerah
8.	Petunjuk Teknis SOP Satpol PP	Satpol PP
9.	Rencana Induk Spam Provinsi	PUBMCK

Hasil pengharmonisasian dan pembulatan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut telah ditetapkan 40 (empat puluh) Peraturan Gubernur Jawa Tengah, seperti tabel berikut:

Tabel 3.11
Daftar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
1.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 6 Februari 2025/ 6 Februari 2025	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 1	Berlaku	Mencabut: a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Provinsi Jawa Tengah c. Ketentuan penomoran dalam Lampiran I Peraturan

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
					Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi Jawa Tengah.
2.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2025 10 Februari 2025/ 10 Februari 2025	Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Bidang Perhubungan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 2	Berlaku	Mencabut : a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional Di Provinsi Jawa Tengah. b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Muatan Angkutan

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
					Barang di Jalan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang
3	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 17 Februari 2025/ 10 Februari 2025	Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3	Berlaku	Mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 21 tahun 2022 tentang tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2025 18 Februari 2025/	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	Berlaku	-

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
	18 Februari 2025	Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	Nomor 4		
5.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 18 Februari 2025/ 18 Februari 2025	Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Tahun 2025-2029	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5	Berlaku	-
6.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 18 Februari 2025/ 18 Februari 2025	Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 6	Berlaku	Mengubah : a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
					Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
7.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 18 Februari 2025/ 18 Februari 2025	Penetapan Perolehan Tanah Nilai Air	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7	Berlaku	Mencabut a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten Atau Kota Provinsi Jawa Tengah b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
					Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
8.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 4 Maret 2025/ 4 Maret 2025	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 8	Berlaku	- Mengubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 - Diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
					Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
9.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2025 10 Maret 2025/ 10 Maret 2025	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 9	Berlaku	Mengubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
10	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2025 10 Maret 2025/ 10 Maret 2025	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 10	Berlaku	-
11	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 10 Maret 2025/ 10 Maret 2025	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas A	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11	Berlaku	Mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas B
12	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2025 14 Maret 2025/	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 12	Berlaku	-

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
	14 Maret 2025	Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman			
13	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 14 Maret 2025/ 14 Maret 2025	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 13	Berlaku	Mencabut : a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah
14	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 14 Maret 2025/ 14 Maret 2025	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun	Berlaku	Mengubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	2025 Nomor 14		Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025
15	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2025 17 Maret 2025/ 17 Maret 2025	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 15	Berlaku	Mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024
16	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2025 17 Maret 2025/ 17 Maret 2025	Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 16	Berlaku	Mencabut Ketentuan yang mengatur mengenai koordinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud dalam: a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. Peraturan

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
					Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah; d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah; f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
					Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah; g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah; h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah; i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
					Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; n. Peraturan Gubernur Jawa

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
					Tengah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah; o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah; p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah; q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
					Tengah; r. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah; s. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; t. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah; u. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
					v. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; w. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah; x. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah; v. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
					Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; w. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah; aa. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah; bb. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan
17	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2025 11 April 2025/ 11 April 2025	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi dan Sinergitas Penyelenggaraan Pesantren	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 17	Berlaku	-

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
18	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2025 7 Juli 2025 7 Juli 2025	tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Bus Rapid Transit Trans Jateng	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 18	Berlaku	-
19	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2025 18 Juli 2025/ 18 Juli 2025	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 19	Berlaku	Mengubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
20	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2025 29 Juli 2025/ 29 Juli 2025	Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 20	Berlaku	Mencabut 1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah; 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
					Tengah; 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah .
21	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2025	Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 21	Berlaku	-
22	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2025 11 Agustus 2025/ 11 Agustus 2025	Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 22	Berlaku	-
23	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2025 11 September 2025/ 11 September 2025	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2024 Dan Sebelum Tahun 2024	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 23	Berlaku	Mencabut : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan 2023 dan sebelum Tahun 2023
24	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025	Penjabaran Perubahan Anggaran	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah	Berlaku	-

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
	12 September 2025/ 12 September 2025	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Tahun 2025 Nomor 24		
25	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2025 25 September 2025/ 25 September 2025	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 25	Berlaku	-
26	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2025 13 Oktober 2025/ 13 Oktober 2025	Fasilitasi Penyelenggaraan Industri Hijau	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 26	Berlaku	-
27	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2025 28 Oktober 2025/ 28 Oktober 2025	Sinergitas Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 27	Berlaku	-
28	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2025 18 November 2025/ 18 November 2025	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 28	Berlaku	-
29	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2025 28 November 2025/ 28 November 2025	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 29	Berlaku	Mengubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
30	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2025 10 Desember 2025/ 10 Desember 2025	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan DI Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 30	Berlaku	Mengubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
31	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2025 19 Desember 2025/ 19 Desember 2025	Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 31	Berlaku	-
32	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2025 19 Desember 2025/ 19 Desember 2025	Jadwal Retensi Arsip Serta Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 32	Berlaku	Mencabut : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2004; 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
					dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Provinsi Jawa Tengah.
33	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2025 23 Desember 2025/ 23 Desember 2025	Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 33	Berlaku	Mencabut : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah
34	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2025 23 Desember 2025/ 23 Desember 2025	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 34	Berlaku	-
35	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2025 29 Desember 2025/ 29 Desember 2025	Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Daerah	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 35	Berlaku	Mencabut : 1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2032;

No.	NOMOR PERATURAN GUBERNUR /TANGGAL PENETAPAN/ TANGGAL PENGUNDANGAN	TENTANG	SUMBER	STATUS	KETERANGAN
					2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Matrik Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
36	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 30 Desember 2025/ 30 Desember 2025	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36	Berlaku	
37	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2025 31 Desember 2025/ 31 Desember 2025	Pengurangan Atas Pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 37	Berlaku	
38	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2025 31 Desember 2025/ 31 Desember 2025	Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 38	Berlaku	
39	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2025 31 Desember 2025/ 31 Desember 2025	Rencana Induk Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Dieng Tahun 2026-2036	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 39	Berlaku	
40	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2025 31 Desember 2025/ 31 Desember 2025	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 40	Berlaku	

Selain itu Biro Hukum dalam peningkatan kualitas reregulasi atau deregulasi melalui pengkajian, analisis dan evaluasi produk hukum pada tahun 2025 juga telah melakukan analisis, evaluasi dan pengkajian terhadap 10 (sepuluh) produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan keadaan, dengan data hasil anev dan pengkajian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12.
Inventarisasi Analisis, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Tahun 2025

No.	Waktu Pengkajian	Obyek Pengkajian, Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum	Data Dukung
I. TRIWULAN I			
1.	30 Januari 2025	Pengkajian Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 51 Tahun 2023 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah	https://idih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/rekom_0_th_2025_1
2.	21 Februari 2025	Pengkajian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	https://idih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/rekom_0_th_2025_2
3.	18 Maret 2025	Pengkajian Analisis dan Evaluasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Organisasi Dan Tata Kerja	https://idih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/rekom_0_th_2025_3
II. TRIWULAN II			
4.	5 Mei 2025	Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Sektor Perizinan dan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir	https://idih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/rekom_0_th_2025_4
III. TRIWULAN III			
5.	16 Juli 2025	Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Terhadap Produk Hukum Daerah Sektor Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan	https://idih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/rekom_0_th_2025_6

6.	22 Juli 2025	Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Terhadap Produk Hukum Daerah Sektor Pekerja Anak	https://idih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/rekom_0_th_2025_5
IV. TRIWULAN IV			
7.	22 Oktober 2025	Analisis dan Evaluasi tentang Produk Hukum Daerah Sektor Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah	https://idih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/rekom_0_th_2025_7
8.	31 Oktober 2025	Analisis dan Evaluasi tentang Produk Hukum Daerah Sektor Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah bidang Kesehatan	https://idih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/rekom_0_th_2025_7
9.	15 Desember 2025	Analisis dan Evaluasi tentang Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Yang Ditetapkan pada Tahun 2025	https://idih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/rekom_0_th_2025_8
10.	17 Desember 2025	Analisis dan Evaluasi tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik	https://idih.jatengprov.go.id/inventarisasi-hukum/detail/rekom_0_th_2025_9

Sedangkan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan untuk menunjang indikator kinerja program persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi, telah berhasil menyusun 12 dokumen fasilitasi dan evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan yang dukung melalui Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota yaitu melakukan evaluasi dan fasilitasi terhadap rancangan produk hukum kabupaten/kota. Hal tersebut dikarenakan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah melaksanakan peran perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat, dalam rangka pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, yang diwujudkan dalam bentuk pengkajian, evaluasi dan

fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Wilayah I, Wilayah II dan Wilayah III.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum
Kabupaten/Kota

No.	Sub Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah I.	Fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dikaji.	155 dokumen	166 dokumen	144 %
2.	Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah II.	Fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dikaji.	120 dokumen	205 dokumen	171 %
3.	Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota Wilayah III.	Fasilitasi dan evaluasi rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota yang dikaji.	120 dokumen	172 dokumen	143 %

b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum.

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang indikator kinerja program persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani.

Fasilitasi penanganan perkara di lembaga peradilan, fasilitasi penanganan perkara di Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin bertujuan :

1. Agar permasalahan hukum secara litigasi dan/atau non litigasi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jawa Tengah dapat terselesaikan.
2. Supaya terwujud sinkronisasi dalam penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
3. Supaya terpenuhi perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Pada indikator program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan dukungan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum :

- a) Pelaksanaan fasilitasi penanganan perkara dari target sebanyak 12 perkara dan telah difasilitasi penanganannya sejumlah 22 perkara (data terlampir).

Tabel 3.14.
Daftar Rekapitulasi Penanganan Perkara Tahun 2025

No	Bulan	Perdata	TUN	Pidana	Sengketa Informasi	Total
1	Januari	<u>121/Pdt.G/2024/PN.Kdl</u> Terkait Perbuatan melawan Hukum penerbitan dan pemberian rekomendasi pengajuan kantor cabang P3MI	<u>97/G/2024/PTUN.SMG</u> Terkait dengan penerbitan Keputusan Gubernur Peresmian Pengangkatan DPRD Kabupaten Sragen <u>98/G/2024/PTUN.SMG</u> Terkait dengan penerbitan Keputusan Gubernur Peresmian Pengangkatan DPRD Kabupaten Temanggung <u>99/G/2024/PTUN.SMG</u> Terkait dengan penerbitan Keputusan Gubernur Peresmian Pengangkatan DPRD Kota Salatiga <u>100/G/2024/PTUN.SMG</u> Terkait dengan penerbitan Keputusan Gubernur Peresmian Pengangkatan DPRD Kabupaten Kendal <u>101/G/2024/PTUN.SMG</u> Terkait dengan penerbitan Keputusan Gubernur Peresmian Pengangkatan DPRD Kabupaten Jepara <u>102/G/2024/PTUN.SMG</u> Terkait dengan penerbitan Keputusan Gubernur Peresmian Pengangkatan DPRD Kabupaten Batang <u>104/G/2024/PTUN.SMG</u> Terkait dengan penerbitan Keputusan Gubernur Peresmian Pengangkatan DPRD Kabupaten Grobogan	NIHIL	NIHIL	8
2	Februari	NIHIL				0
3	Maret	NIHIL				0
4	April	<u>21/Pdt.G/2025/PN.Pwt</u> Terkait Perbuatan Melawan Hukum Penyelesaian Hak Tanggungan dengan jaminan Sertifikat HGB I	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1

No	Bulan	Perdata	TUN	Pidana	Sengketa Informasi	Total
		Bank Jateng Cabang Purwokerto.				
5	Mei	NIHIL	NIHIL	<u>4/Pid.Pra/2025/PN.Smg</u> Terkait dengan Perbuatan Penghentian Penyidikan atas aduan Laporan Pelanggaran ODOL	001/SI/01/2025 Terkait Permohonan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pendidikan Prov. Jateng antara Perkumpulan Lentera Waseso Negero dengan Sekretaris Daerah Prov. Jateng.	2
6	Juni	NIHIL	<u>31/G/2025/PTUN.SMG</u> Terkait dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. <u>5/G/2025/PTTUN.SBY</u> Terkait dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.	NIHIL	NIHIL	2
7	Juli	<u>99/Pdt.G/2025/PN.Skt</u> Terkait Perbuatan melawan Hukum dalam dugaan penggunaan Ijazah Palsu (atas nama Ir. Joko Widodo). <u>294/Pdt.G/2025/PN.SMG</u> Terkait dengan Perbuatan melawan Hukum Gubernur Jawa Tengah dalam Pengelolaan Air Limbah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	2
8	Agustus	<u>399/Pdt.G/2025/PN.Smg</u> Terkait Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah Musnah di Sayung Demak	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1
9	September	<u>35/Pdt.G/2025/PN.Btg</u> Terkait Perbuatan Melawan Hukum sengketa aset milik Dinas Perkebunan <u>58/Pdt.G/2025/PN.Pwt</u> Terkait Perbuatan Melawan Hukum pengadaan pembangunan SMK Negeri Lumbir	<u>72/G/2025/PT.Smg</u> Terkait dengan Persetujuan Teknis Izin Usaha Pertambangan PT. WWI	NIHIL	NIHIL	3
10	Oktober	<u>36/Pdt.G/2025/PN.Bla</u> Terkait Perbuatan Melawan Hukum sengketa aset milik Dinas BMCK	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1
11	November	<u>55/Pdt.G/2025/PN.Pml</u> Terkait Perbuatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	1

No	Bulan	Perdata	TUN	Pidana	Sengketa Informasi	Total
		Melawan Hukum di SMK Muhammadiyah Belik				
12	Desember	NIHIL	<u>6/G/2025/PTTUN.SBY</u> Terkait dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.	NIHIL	NIHIL	1
TOTAL						22

Pada tahun 2025 terdapat 14 perkara yang melibatkan Pemerintah Daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15.

Daftar Perkara Yang Melibatkan Pemerintah Daerah Tahun 2025

No	Nomor Perkara	Keterangan	Tahapan
A	PERDATA		
1.	121/ Pdt.G/2024/PN.Kdl	Terkait Perbuatan melawan Hukum penerbitan dan pemberian rekomendasi pengajuan kantor cabang P3MI	Putusan
2.	21/Pdt.G/2025/PN.Pwt	Terkait Perbuatan Melawan Hukum Penyelesaian Hak Tanggungan dengan jaminan Sertifikat HGB I Bank Jateng Cabang Purwokerto.	Putusan
3.	99/Pdt.G/2025/PN.Skt	Terkait Perbuatan melawan Hukum dalam dugaan penggunaan Ijazah Palsu (atas nama Ir. Joko Widodo).	Putusan
4.	294/Pdt.G/2025/PN.SMG	Terkait dengan Perbuatan melawan Hukum Gubernur Jawa Tengah dalam Pengelolaan Air Limbah	Putusan
5.	399/Pdt.G/2025/PN.Smg	Terkait Perbuatan Melawan Hukum Sengketa Tanah Musnah di Sayung Demak	Pembuktian
6.	35/Pdt.G/2025/PN.Btg	Terkait Perbuatan Melawan Hukum sengketa aset milik Dinas Perkebunan	Replik
7.	58/Pdt.G/2025/PN.Pwt	Terkait Perbuatan Melawan Hukum pengadaan pembangunan SMK Negeri Lumbr	Pembuktian
8.	36/Pdt.G/2025/PN Bla	Terkait Perbuatan Melawan Hukum sengketa aset milik Dinas BMCK	Jawaban
9.	55/Pdt.G/2025/PN Pml	Terkait Perbuatan Melawan Hukum di SMK Muhammadiyah Belik	Mediasi
B.	TATA USAHA NEGARA		
1.	97/G/2024/PTUN.SMG	Terkait dengan penerbitan Keputusan Gubernur Peresmian	Putusan

No	Nomor Perkara	Keterangan	Tahapan
		Pengangkatan DPRD Kabupaten Sragen	
2.	98/G/2024/PTUN.SMG	Terkait dengan penerbitan Keputusan Gubernur Peresmian Pengangkatan DPRD Kabupaten Temanggung	Putusan
3.	99/G/2024/PTUN.SMG	Terkait dengan penerbitan Keputusan Gubernur Peresmian Pengangkatan DPRD Kota Salatiga	Putusan
4.	100/G/2024/PTUN.SMG	Terkait dengan penerbitan Keputusan Gubernur Peresmian Pengangkatan DPRD Kabupaten Kendal	Putusan
5.	101/G/2024/PTUN.SMG	Terkait dengan penerbitan Keputusan Gubernur Peresmian Pengangkatan DPRD Kabupaten Jepara	Putusan
6.	102/G/2024/PTUN.SMG	Terkait dengan penerbitan Keputusan Gubernur Peresmian Pengangkatan DPRD Kabupaten Batang	Putusan
7.	104/G/2024/PTUN.SMG	Terkait dengan penerbitan Keputusan Gubernur Peresmian Pengangkatan DPRD Kabupaten Grobogan	Putusan
8.	31/G/2025/PTUN.SMG	Terkait dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.	Putusan
9.	5/G/2025/PTTUN.SBY	Terkait dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.	Putusan
10.	72/G/2025/PTUN.SMG	Terkait dengan Persetujuan Teknis Izin Usaha Pertambangan PT. WWI	Kesimpulan
11.	6/G/2025/PTTUN.SBY	Terkait dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.	Jawaban
C. PIDANA			
1.	4/Pid.Pra/2025/PN.Smg	Terkait dengan Perbuatan Penghentian Penyidikan atas aduan Laporan Pelanggaran ODOL	Putusan
D. SENGKETA INFORMASI PUBLIK			
1.	001/SI/01/2025	Terkait Permohonan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pendidikan Prov. Jateng antara Perkumpulan Lentera Waseso Ngoro dengan Sekretaris Daerah Prov. Jateng.	Putusan

- b) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya untuk memperoleh pemerataan keadilan, maka Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan langkah-langkah melalui fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya yang sedang berperkara di lembaga peradilan yang bekerjasama dengan 23 (dua puluh tiga) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Provinsi Jawa Tengah, antara lain :
1. Pimpinan Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah;
 2. Pimpinan Yayasan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jawa Tengah;
 3. Pimpinan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ratu Adil;
 4. Pimpinan Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kabupaten Kudus;
 5. Pimpinan Lembaga Bantuan Dan Konsultasi Hukum Kabupaten Kudus;
 6. Pimpinan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sultan Ageng;
 7. Pimpinan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu;
 8. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Kamilia;
 9. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Surya Kusuma Demak;
 10. Pimpinan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abdul Ghofur and Patners;
 11. Pimpinan Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara;
 12. Pimpinan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Jepara;
 13. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Temanggung;
 14. Pimpinan Perkumpulan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
 15. Pimpinan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Purwokerto;

16. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Sakti Purworejo;
17. Pimpinan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo;
18. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Banjarnegara;
19. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Wahana Cilacap;
20. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Purwa Justicia Purwodadi;
21. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Pendowo Solotigo.
22. Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal;
23. Pimpinan Perkumpulan Law & Justice Semarang.

Pada Tahun 2025 melalui LBH telah menangani 340 perkara sebagaimana data terlampir.

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum yang juga sebagai penunjang indikator kinerja program Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM, dilaksanakan melalui dukungan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, pada tahun 2025 Biro Hukum telah melakukan fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum Non Litigasi dan Aduan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sejumlah 60 perkara, sebagaimana dalam daftar lampiran.

Selain itu Biro Hukum juga telah melakukan penilaian terkait Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP-HAM) kepada 35 kabupaten/kota se- Jawa Tengah.

- c. Selanjutnya Program Administrasi Umum dengan indikator kinerja program Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum yang merupakan indikator penunjang indikator kinerja program utama yang ada di Biro Hukum, didukung oleh Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang pelaksanaannya didukung oleh Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang sumber

dananya berasal dari Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pelaksanaan kegiatannya terfokus pada sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai, diantaranya adalah :

- Sosialisasi pemberantasan cukai ilegal melalui pembuatan dan pemasangan iklan videotron, penyebaran iklan banner, spanduk, leaflet yang bertema "GEMPUR CUKAI ILEGAL".
- Sosialisasi Pemberantasan Cukai Ilegal kepada masyarakat bekerjasama dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES) melalui kegiatan KKN Tematik Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang berlokasi di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Brebes.
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai melalui talkshow di radio.

Sedangkan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang didukung oleh Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD merupakan kegiatan penunjang tugas pokok dan fungsi Biro Hukum berupa kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan umum, kegiatan survey peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Biro Hukum dengan nilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89, 25 dan Nilai Indeks Manajemen Risiko sebesar 2,71 serta kegiatan koordinasi dan konsultasi kepada Lembaga Pemerintah Pusat dan Lembaga Teknis lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum. Selain itu dalam rangka pengembangan kompetensi ASN dilingkungan Biro Hukum, telah berhasil mencapai nilai IP ASN sebesar 88,17 (Tinggi). Disamping itu Biro Hukum dalam upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan ASN Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dengan mengikuti sertakan dalam Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sejumlah 5 orang.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.235.169.000,- tercapai realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.174.713.420,- (98,13%). Rincian penggunaan anggaran pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16.
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.810.651.000	2.763.129.720	98,31
	a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	1.330.511.000	1.309.203.620	98,4
	b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	1.480.140.000	1.453.926.100	98,23
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	424.518.000	411.583.700	96,95
	a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	326.480.000	315.845.100	96,74
	b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.038.000	95.738.600	97,65

3.3 INOVASI

Biro Hukum pada tahun 2025 dalam upaya penyebaran / penyuluhan informasi hukum kepada aparatur pemerintah dan masyarakat secara interaktif dengan membangun ruang sarana melalui Podcast JDI Hukum Biro Hukum. Selain itu sebagai upaya memudahkan para penyandang disabilitas dalam mengakses informasi hukum, maka di dalam website JDIH Jateng telah diberikan fasilitasi tools akses untuk penyandang disabilitas.

3.4 PENGHARGAAN

Sebagai wujud kinerja nyata pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Urusan-Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 telah memperoleh beberapa penghargaan, antara lain :

a. Peringkat II “Eka Acapalati” sebagai Anggota JDIH Nasional Kategori Pemerintah Provinsi dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan nilai 96.

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN tanggal 17 Oktober 2025 nomor PHN.4-HN.03.05-166 hal Pemberitahuan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024 disampaikan bahwa hasil penilaian kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024 untuk Kategori Provinsi, maka JDIH Jawa Tengah memperoleh Nilai 96 dan merupakan Peringkat II.

b. Juara I Kategori Provinsi penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025 dengan nilai 99,72 (AA/Istimewa).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan sebagai Terbaik I Indeks Reformasi Hukum Kategori Pemerintah Daerah Provinsi yang diserahkan Menteri Hukum RI kepada Gubernur Jawa Tengah. Indeks Reformasi Hukum ini merupakan capaian pertama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pemenuhan Indeks Reformasi Hukum. Penyerahan Penghargaan dilakukan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat pada 18 Desember 2025.

Gambar 3.1.
Penerimaan Penghargaan Juara I Kategori Provinsi
Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025



Gambar 3.2.
Piagam Penghargaan Juara I Kategori Provinsi
Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025



c. Penghargaan Dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Terbaik II Tingkat Biro Tahun 2025.

Biro Hukum berhasil meraih **Penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Juara II Kategori Biro** dari Gubernur Jawa Tengah yang diserahkan bersamaan dengan Rapat Koordinasi UKPBJ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 di Hotel Patra Jasa Semarang yang berlangsung pada tanggal 3-4 Desember 2025. Pencapaian ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi Biro Hukum dalam menerapkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghargaan ini mencerminkan keberhasilan dalam penguatan perencanaan pengadaan, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap regulasi, pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengadaan. Prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pengadaan yang efektif, efisien, dan berintegritas.

Gambar 3.3.
Penerimaan Penghargaan Dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Terbaik II Tingkat Biro Tahun 2025



Gambar 3.4.
Piagam Penghargaan dan Trophy Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Terbaik II Tingkat Biro Tahun 2025



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil capaian kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Hukum pada tahun anggaran 2025 telah terlaksana sesuai target yaitu capaian sebesar 100% dengan kategori "**Baik**".

Tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dilaksanakan melalui 2 (dua) Program yaitu **Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum** dengan alokasi anggaran Rp. 2.810.651.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.763.129.720,- (98,31 %). Program ini terdistribusi ke dalam 4 Indikator Kinerja Program yang semuanya dengan tingkat capaian sangat tinggi yaitu:

- 1) Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang undangan dengan realisasi 100% telah sesuai target;
- 2) Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi dengan realisasi 103% melebihi target. Capaian ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah permohonan evaluasi dari pemerintah kabupaten/kota, optimalisasi proses harmonisasi dan fasilitasi, serta penguatan koordinasi dan monitoring internal. Deviasi positif tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan pembinaan produk hukum daerah sekaligus mencerminkan meningkatnya kebutuhan harmonisasi regulasi di tingkat kabupaten/kota.
- 3) Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani dengan realisasi 102% melebihi target. Hal ini disebabkan target awal disusun berdasarkan rencana jumlah perkara awal tahun perencanaan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat tambahan perkara yang masuk dan tetap dapat ditangani secara optimal

sehingga realisasi melampaui target. Diantaranya target penanganan perkara yang semula ditargetkan sebanyak 12 perkara, namun dalam pelaksanaannya telah dilakukan penanganan 22 perkara.

- 4) persentase kabupaten/kota peduli HAM dengan realisasi 100% telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pencapaian sesuai target yang diharapkan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pelaksanaan koordinasi, konsultasi serta fasilitasi antara Biro Hukum dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah terkait serta Pemerintah Kabupaten/Kota berjalan dengan baik. Selain itu keberadaan aplikasi layanan yang dimiliki Biro Hukum seperti E-PHD Provinsi Jawa Tengah, Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jawa Tengah dan Aplikasi eWaskito Jateng yang mempermudah pelaksanaan evaluasi, fasilitasi, pengkajian, penyusunan rancangan produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota, pendokumentasian dan penginformasian produk hukum lebih efektif dan efisien. Keberadaan Aplikasi Layanan Bantuan Hukum (Bantuan Hukum Online) juga mempunyai peran penting dalam penyediaan layanan bantuan hukum dan kerjasama pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui LBH di Jawa Tengah yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Aplikasi Rencana Aksi HAM (RANHAM) dalam penyelenggaraan pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) melalui Pelaporan Aksi HAM Daerah.

Disamping itu adanya beberapa keberhasilan dalam mendapatkan prestasi dan menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat menunjang tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, diantaranya :

1. Memperoleh penghargaan Terbaik ke-2 Pengelola JDIH Terbaik kategori Pemerintah Provinsi.
2. Penghargaan Terbaik I Indeks Reformasi Hukum Kategori Pemerintah Daerah Provinsi.

3. Memperoleh Penghargaan Dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Terbaik II Tingkat Biro Tahun 2025.

Sedangkan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** sebagai program pendukung dengan alokasi anggaran Rp.424.518.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% (sangat tinggi) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 411.583.700,- (96,95%). Hal tersebut menunjukkan efektivitas pengelolaan fungsi administratif dan dukungan manajemen internal. Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

1. Optimalisasi Tata Kelola Administrasi
 - Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum berjalan tertib dan sesuai standar operasional.
 - Sistem monitoring realisasi fisik dan keuangan dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan).
 - Minimnya keterlambatan proses administrasi.
2. Efektivitas Pengelolaan Anggaran
 - Tingkat serapan anggaran tinggi dan proporsional terhadap capaian output.
 - Realisasi belanja operasional mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis.
 - Tidak terdapat kendala signifikan dalam proses pengadaan barang/jasa.
3. Dukungan SDM dan Manajemen Kinerja
 - Pembagian tugas yang jelas dan proporsional.
 - Penguatan fungsi pengendalian internal.
 - Monitoring capaian indikator dilakukan secara rutin.
4. Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemanfaatan aplikasi internal pemerintah daerah mempercepat proses administrasi dan pelaporan kinerja, seperti sistem e-planning, e-budgeting, dan e-controlling yang terintegrasi.
5. Karakteristik Indikator Program Penunjang

Sebagian besar indikator dalam Program Penunjang bersifat:

- Output administratif,
- Persentase pemenuhan layanan internal,
- Tingkat ketersediaan sarana prasarana.

4.2. REKOMENDASI

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun berjalan, Biro Hukum perlu memperkuat kualitas harmonisasi produk hukum, meningkatkan efektivitas manajemen perkara, mengoptimalkan pengelolaan dokumentasi hukum, serta mengintegrasikan manajemen risiko dalam setiap proses penyusunan kebijakan. Peningkatan kapasitas SDM dan penyempurnaan indikator kinerja juga menjadi prioritas untuk mendorong akuntabilitas dan kualitas layanan hukum daerah yang lebih optimal. Untuk itu hal-hal yang perlu direkomendasikan adalah:

1. Mengintegrasikan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses harmonisasi rancangan Perda/Perkada melalui uji materi berbasis prinsip non-diskriminasi, keadilan, dan perlindungan kelompok rentan.
2. Melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota agar substansi rancangan produk hukum selaras dengan prinsip HAM dan tidak berpotensi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
3. Mendorong Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum yang belum pernah mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum melalui pelatihan teknis.
4. Semua ASN untuk mengikuti pengembangan kompetensi dan memasukkan ke dalam Indikator Kinerja Individu (IKI) masing-masing ASN sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3.4/459/2025 tentang Peningkatan Kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

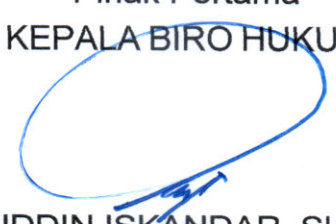
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Pihak Pertama
KEPALA BIRO HUKUM


IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	97%
2.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah Kabupaten/Kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji.	97%
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas bantuan hukum.	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	96%
4.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas Kabupaten/Kota peduli HAM.	Persentase kabupaten/kota peduli HAM.	96%
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum.	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum.	100%
	5.1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum	82,5
	5.2. Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah.	Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum	3

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Rp. 2.918.000.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 504.092.000,-	Sumber Anggaran dari APBD 100%

Semarang, 10 Januari 2025


 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH
 SUMARNO, SE, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19700514 199202 1 001

KEPALA BIRO HUKUM

 IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19711207 199503 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAERUDIN, SH, MH.
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : SUMARNO, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumarno, SE, MM.
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

Pihak Pertama
Kepala Biro Hukum

Haerudin, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP 197007291996031001

**Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025**

No.	Lembaga	Jumlah Perkara (Triwulan I)	Jumlah Perkara (Triwulan II)	Jumlah Perkara (Triwulan III)	Jumlah Perkara (Triwulan IV)	TOTAL
1	LBH Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Wilayah 'Aisiyiah Jawa Tengah	1	7	5	3	16
2	Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jawa Tengah	2	6	5	5	18
3	Yayasan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUMADIN) Kabupaten Kudus	1	6	5	2	14
4	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kudus	1	6	5	4	16
5	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sultan Ageng	0	5	5	5	15
6	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Satria Tegowanu	1	6	5	5	17
7	Lembaga Bantuan Hukum Kamilia	1	6	5	3	15
8	Lembaga Bantuan Hukum Surya Kusuma	1	6	5	3	15
9	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abdul Ghofur and Patners	1	6	5	8	20
10	Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara	1	6	5	3	15
11	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Jepara	1	6	4	3	14
12	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang	1	6	5	4	16
13	Lembaga Bantuan Hukum Sakti Purworejo	2	6	5	5	18
14	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonos	1	6	5	4	16
15	Lembaga Bantuan Hukum Banjarnegara	1	6	5	3	15
16	Lembaga Bantuan Hukum Wahana Cilacap	1	5	5	5	16
17	Lembaga Bantuan Hukum Purwa Justicia	1	6	5	0	12
18	Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Pendowo Solotigo	2	6	5	6	19
19	Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal	1	6	5	3	15
20	Perkumpulan Law & Justice Semarang	0	7	5	4	16
21	Lembaga Bantuan Hukum Garda Keadilan Indonesia Jawa Tengah	1	6	5	0	12
22	LBH 'Aisiyiah Kebumen	0	0	6	4	10
Jumlah		22	126	110	82	340

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah.	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan.	100%
2.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas produk hukum daerah Kabupaten/Kota.	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji.	100%
3.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas bantuan hukum.	Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani.	100%
4.	Meningkatkan kualitas kebijakan dan efektifitas Kabupaten/Kota peduli HAM.	Persentase kabupaten/kota peduli HAM.	100%
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum.	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum.	100%
	5.1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Hukum	82,5
	5.2. Meningkatnya manajemen risiko perangkat daerah.	Indeks Manajemen Risiko Biro Hukum	3

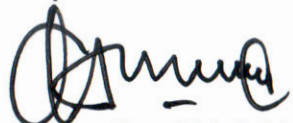
Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Rp. 2.810.651.000,-	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan 100%
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 424.518.000,-	Sumber Anggaran dari APBD Perubahan 100%

Semarang, 1 Oktober 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Kepala Biro Hukum


Haerudin, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP 197112071995031003

32	26 Agustus 2025		Sdr. D. Erick	Pemilik Hak Siar	Mohon bantuan terkait Sdr. Pengadu dilaporkan ke Polda oleh PH Vidio	Mohon Audiensi dan perlindungan hukum	UMKM	Telah menyampaikan secara langsung bahwa Pemrov Jateng tidak dapat mengintervensi proses hukum yang ada di POLDA Jawa Tengah dan telah membantu memberikan dampingan serta Ybs telah bernegosiasi namun tidak menemukan kesepakatan
33	29 Agustus 2025	051-B/HUKUM/DPN-SS/VI/2025 tanggal 17 Agustus 2025	DPN LBH Sapu Jagad	Pemerintah Desa Jaten	Pembangunan tanah kas desa menjadi ruko oleh pengembang dan sudah ada perjanjian dengan desa akan tetapi dana dar pengembang tidak masuk ke desa tetapi di duga disalahgunakan oleh kepala desa	Permohonan Perlindungan Hukum	Pertanahan	Telah dilakukan pengkajian dan intinya masuk ranah pidana
Periode September 2025								
34	8 September 2025	54/SS-LGL/VIII/2025	DPP Benteng Indonesia	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Somasi Perbuatan Melawan Hukum terkait aset Mangkang Kulon	Membatalkan SHP 429	Pertanahan	Telah ditindaklanjuti dengan berkirim surat yang intinya permohonan tidak dapat dipenuhi'
35	9 September 2025	075/PB/PI-SMG/XI/2025 tanggal 1 September 2025	Peradi Soegiharto & Rekan		Adanya penyegehan terhadap PT Target Makmur Sentosa yang mengakibatkan ratusan pekerja tidak dapat bekerja	Permohonan Bantuan dan dukungan	Pertanahan	Dalam Tahap Kajian dan Koordinasi
36	10 September 2025	21/SPP-JATENG PROV / LFEA /VIII / 2025 tanggal 21 Agustus 2025	LAWFIRM EA & Partners	Slamet muharso alias Ardiansyah, Rina Isabela, Edi Rusdianto	adanya dugaan TPPO, dan meminta atesni khusus dari gubernur jawa tengah	Permohonan Audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah	Pelayanan Publik	Dalam Tahap Kajian dan Koordinasi
37	10 September 2025	Masyarakat Kab. Semarang tanggal 16 Juli 2025	Sdr. Dyah Ayu Ekawati	PT. Ack	Warga perumahan punsae blok 7/9 kalonan, ungaran timur sudah membeli lunas rumah pada tahun 2019 tetapi belum menerima AJB dan Sertifikat dan tiba-tiba mendapat somasi dari BTN agar menebus sebesar 40jt/80jt, jika tidak ditebus maka rumah harus dikosongkan/dilelang	Permohonan Audiensi dan Perlindungan Gubernur Jawa Tengah	Pertanahan	Telah berkoordinasi dengan Disperakim yang intinya terhadap erumahan PUNSAE telah ditangani oleh Pemerintah Pusat
38	10 September 2025		Sdr. Ibu Ani S.	Pemerintah Desa Margorejo	Adanya penguasaan tanah warisan yang dilakukan oleh tetangga desa	Permohonan Audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah	Pertanahan	Telah dirapatkan bersama DISPERAKIM Provinsi Jawa Tengah dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan mengadakan mediasi
39	12 September 2025	10/GJL/IX/2025 tanggal 10 September 2025	Gerakan Jalan Lurus	PT. Petropak	Adanya aktivitas pengerukan tanah yang dilakukan oleh PT. Petropak yang mengakibatkan rumah warga Bambankerep longsor	Permohonan mediasi warga terdampak & PT. Petropak	Pertanahan	Telah mengundang Pemerintah Kota Semarang dan akan mempertemukan antara Pengadu dengan Pemkot Semarang



 birohukum@jatengprov.go.id

 Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang

 024-8311282